

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abu Huraerah, 2018, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Ali, Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2000. Sistem Peradilan Pidana: Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung: Binacipta (edisi cetak ulang)
- Barda, Nawawi Arief. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister. Semarang.
- Delyana Sahnt. 2004. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, edisi cetak ulang.
- Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Dillah, Suratman dan H Philips. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung.
- Effendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Hamzah, A. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, H, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, ALFABETA, Bandung.
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra. 2005. Kapita Selektora Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Marbun, Rocky. 2015. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press.
- Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2000. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. Muladi dan barda Nanawi. 1998. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung.
- Muhammad, Rusli. (2011). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muladi D. 2002. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Centre.

- Parera, Theodorus Yosep. (2016). *Advokat Dan Penegak Hukum*. Yogyakarta: Genta
- Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 229
- Rabbani A.2010. *Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli*. Jakarta: Erlangga.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP.
- Waluyo, Bambang 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Wirantini, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Yusuf, A. M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Zaenudin, A. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Artikel dalam Jurnal**

- Abdul Jabar Rahim. 2019. Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. *Jurnal Hukum Responsif FH Unpab*. Volume 7 Nomor 2.
- Agung Budi Santoso, 2019 “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10 no. 1
- Alfan Maulidin Ichwanto. 2017. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. Volume 20 Nomor 1.
- Angin . 2022. Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr). Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 5 Nomor 3).
- Angriyani . 2022. Tinjauan Yuridis Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. *Jurnal Petikum* Vol 10, No, 1, April 2022 pp, 24-36 p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017.

- Bondan, Gandjar L. (2011). *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative justice*, Kerjasama antara Lembaga perlindungan saksi dan korban dengan departemen kriminologi Fisip UI, Jakarta.
- Ferdiansyah, D. J. (2017). *Optimalisasi Penerapan Restorative justice Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo*. *Advances in Police Science Research Journal*, Jurnal 1 Nomor 5.
- Friandy, Bob. 2017. "Sanksi Kebiri Kimia (Analisis UU No. 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)". *Jurnal Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2.
- Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Jurnal AL'Adl*. Volume 10, Nomor 2 (hlm. 184-182)
- Hutapea, Messy Rachel. 2020. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 3, Nomor 1.
- Imam Immanudin, 2020. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Syair Hukum Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 17, Nomor 2 (hal.145)
- Keristiawan. 2020. *Penanggulangan Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) Di Wilayah Hukum Polres Buleleng*. Fakultas Hukum Universitas Udayana. *Jurnal Kertha Desa* Vol. 9 No. 2, Hlm. 13-23 X.
- Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). *Pendekatan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(2), 495-509.
- M. Husein Maruapey. (2017). "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. 7. No.1.
- Mardiya, Nuzul Qur'ani. 2017. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1.
- Monica. 2021. *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)*. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Volume 4 Nomor 2).
- Ni Made Dwi Kristiani. (2014). "Kejahatan Kekerasan Seksual (perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7. No.3.
- Novitasari. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (3).

Sanyoto. (2008.) "Penegakan Hukum Di Indonesia". Jurnal Dinamika Hukum. Vol.8. No.3

Tri Wahyu Widiastuti. (2016). "Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak". Journal UNISRI. Vol.1

### **Artikel dalam Internet**

Malik. (2020). **Jenis-Jenis Tindak Pidana.**  
<https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html> di akses pada 10/29/2023.

Oktavira. (2023). Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> di akses pada 10/29/2023.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo5 1052).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara No. 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4235)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886S).

